

## **Pengaruh Bantuan Kemanusiaan Aceh bagi Pengungsi Rohingya Terhadap Upaya Diplomasi Kemanusiaan**

***Mumtazinur***

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
mumtazinur@ar-raniry.ac.id*

**Abstrak :** *Tulisan ini beranjak dari krisis kemanusiaan yang melanda Rakhine Myanmar yang berimbas pada munculnya arus pengungsi eksternal menuju berbagai negara termasuk Indonesia. Bantuan Kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat Aceh menjadi penting mengingat banyak negara yang menolak kehadiran pengungsi Rohingya ini. Selain itu tulisan ini mencoba mengulas bantuan kemanusiaan Aceh bagi Pengungsi Rohingya serta korelasinya bagi upaya diplomasi kemanusiaan (Humanitarian Diplomacy) Pemerintah Indonesia. tulisan ini juga memaparkan latar belakang bantuan kemanusiaan yang diberikan masyarakat Aceh bagi pengungsi Rohingya serta bentuk-bentuk bantuan yang diberikan. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat Aceh kepada pengungsi Rohingya turut mempengaruhi upaya diplomasi kemanusiaan pemerintah Indonesia. Peran masyarakat aceh yang dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai aktor kemanusiaan turut memperkuat sekaligus menegaskan posisi kepemimpinan Indonesia ditingkat kawasan dan global sebagai pendukung perdamaian dunia. Sehingga secara tidak langsung masyarakat Aceh juga menempatkan dirinya sebagai peace supporter yang siap menyokong*

*kebijakan politik luar negeri Indonesia dan yang mengedepankan diplomasi kemanusiaan sebagai langkah strategis menciptakan perdamaian dunia.*

**Kata Kunci:** *Diplomasi Kemanusiaan, Rohingnya, Bantuan Kemanusiaan, Politik Luar Negeri Indonesia*

**Abstract :** *This paper begins from the humanitarian crisis that struck Rakhine Myanmar which impacted on the emergence of external refugee flows to various countries including Indonesia. Humanitarian assistance provided by the people of Aceh becomes important considering that many countries reject the presence of these Rohingnya refugees. In addition, this paper attempts to review Aceh's humanitarian assistance to Rohingnya refugees and their correlation to the Indonesian Government's humanitarian diplomacy. This paper also describes the background of humanitarian assistance provided by the Acehnese people to Rohingnya refugees and the forms of assistance provided. Humanitarian assistance provided by the people of Aceh to Rohingnya refugees also influenced the Indonesian government's humanitarian diplomacy efforts. The role of the Acehnese community which in this context can be said is one of a humanitarian actor that also strengthens and emphasizes Indonesia's leadership position at the regional and global level as a supporter of world peace. So that the people of Aceh indirectly in the position as peace supporters who are ready to support Indonesia's foreign policy and who promote humanitarian diplomacy as a strategical step to create peace for entire world.*

**Keywords :** *Humanitarian Diplomacy, Rohingnya, Humanitarian Aid, Indonesian Foreign Policy*

## **PENDAHULUAN**

Beberapa tahun terakhir dunia internasional dikejutkan dengan konflik yang terjadi di Myanmar yang melibatkan sejumlah kelompok Budha Rakhine dan muslim Rohingnya. Kelompok Rohingnya sendiri adalah warga "pribumi" (*native*) Arakan, dan karena itu mereka sering disebut "Muslim Arakan" atau "India Arakan". Tetapi eksistensi Rohingnya ditolak di Myanmar sehingga menyebabkan mereka menjadi salah satu kelompok etnis yang tidak memiliki negara sama seperti etnik Kurdi atau Berber di Timur Tengah.

Kerusuhan yang mulai terjadi sejak tahun 2012 semakin lama semakin memburuk. Bahkan Pemerintah Myanmar membentuk status darurat militer bagi daerah Rakhine dan mengizinkan dilakukannya intervensi militer. Kondisi ini tidak lantas menjadi solusi bagi pemulihan konflik ini malah semakin mempertajam dan memperburuk hubungan kedua kelompok yang notabene berbeda agama. Tragedi kekerasan ini menyebabkan muslim Rohingnya menjadi korban. Banyak yang tewas, rumah dan desa mereka dibakar, dan ratusan ribu muslim Rohingnya menjadi pengungsi dan memilih untuk meninggalkan negara

mereka. Banyak dari mereka yang memilih negara-negara tetangga terdekat mereka seperti Thailand, Bangladesh, Malaysia, maupun Indonesia sebagai tujuan mencari perlindungan.

Terlepas dari pemicu konflik yang masih menjadi perdebatan, namun tragedi kemanusiaan yang terjadi yang kemudian menyebabkan gelombang pengungsi ke berbagai negara cukup menyita perhatian dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan jumlah pengungsi Rohingya, yang terpaksa lari dari kampung halamannya di Rakhine, Myanmar, menuju Bangladesh kini sudah mencapai 589.000 orang. Jumlah ini diperkirakan akan segera mencapai 600 ribu pengungsi. Sekitar 60 persen dari mereka ialah anak-anak dan remaja. Jumlah ini meningkat dibanding data pada 17 Oktober 2017. Dan jumlah ini terus bertambah termasuk arus pengungsi yang menuju ke Indonesia yang kurang lebih berjumlah 12.000 orang.

Dalam konteks keterkaitannya dengan kewajiban negara sebagai otoritas tertinggi maka perlu dijelaskan melalui konsep *Responsibility to Protect*. Dalam konsep *Responsibility to Protect* yang diusung Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations*) memberikan tanggung jawab kepada setiap negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Namun, ironisnya konsep ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh Myanmar yang dalam konteks ini yang dianggap oleh dunia internasional melakukan pembiaran terhadap praktik kekerasan yang terjadi. Sehingga arus pengungsi eksternal keberbagai negara pun tidak dapat dibendung lagi, salah satunya yang menjadi tujuan pengungsi yaitu Aceh, Indonesia.

Kurang lebih sejak dua tahun lalu, provinsi Aceh banyak menampung pengungsi muslim Rohingnya yang tanpa sengaja ditemukan terombang-ambing dilautan Aceh atau yang bahkan sudah merencanakan Aceh sebagai destinasi mereka. Masyarakat kemudian menyebutnya sebagai ‘manusia perahu’ karena perjalanan panjang dan menyedihkan mereka di lautan untuk mencari perlindungan dan bantuan dengan menggunakan perahu. Kondisi ini menyita perhatian nasional dan juga internasional mengingat konflik yang terjadi memaksa mereka untuk keluar dari negara dan mengharapkan uluran bantuan kemanusiaan negara tetangga. Masyarakat Aceh sendiri mencoba memberikan bantuan kemanusiaan dalam berbagai bentuk sebagai wujud aksi cepat tanggap.

Ada beberapa hal menarik yang penting untuk diteliti dalam masalah ini, yaitu diantara banyak negara yang menolak untuk menerima arus pengungsi Rohingnya, Indonesia menjadi negara yang cukup ‘ramah’ sebagai tuan rumah bagi para muslim Rohingnya. Salah satu alasan penolakan mereka yaitu karena merasa tidak ingin melakukan intervensi atas konflik yang terjadi sebagaimana prinsip yang dipegang teguh oleh anggota-anggota ASEAN. Namun, langkah yang diambil Indonesia dan masyarakat Aceh khususnya berbeda sehingga semakin menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian.

Jika kita telaah, maka banyak tulisan yang mengulas mengenai konflik kemanusiaan yang menimpa muslim Rohingnya Myanmar. Beberapa menulis mengenai intervensi kemanusiaan yang diberikan dalam bentuk respons oleh negara-negara. Beberapa kajian lainnya banyak mengulas mengenai kemunculan konflik kemanusiaan di Rakhine itu sendiri .

Namun, sepengetahuan penulis belum menemukan ulasan yang secara spesifik mengangkat bantuan masyarakat Aceh dan hubungannya dengan upaya diplomasi kemanusiaan pemerintah Indonesia. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan rekomendasi akan pentingnya peran masyarakat bagi komunitas dan relasi internasional. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terutama bagi para peminat kajian politik internasional dan kemanusiaan serta masyarakat secara luas. Adapun yang menjadi pertanyaan dari tulisan ini yaitu, bagaimana pengaruh kontribusi masyarakat bagi upaya diplomasi kemanusiaan Indonesia?

## **PEMBAHASAN**

### **Diplomasi Kemanusiaan Indonesia**

Diplomasi dapat diartikan sebagai proses politik yang dengannya entitas politik pada umumnya negara, mengadakan dan memelihara atau mempertahankan hubungan-hubungan resmi, langsung maupun tidak langsung satu sama lain dalam rangka mengejar tujuan, maksud, dan kepentingan mereka masing-masing, dan kebijakan-kebijakan prosedural atau hakiki dalam lingkungan internasional (Ambarwati, 2010:126). Diplomasi memiliki berbagai bentuk salah satunya adalah diplomasi kemanusiaan. Istilah ini menjadi sangat relevan saat membicarakan situasi yang berkenaan dengan kemanusiaan. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada pihak yang membutuhkan dalam situasi genting dapat dikategorikan sebagai bagian dari diplomasi kemanusiaan.

Diplomasi kemanusiaan sebagai salah satu dimensi diplomasi memiliki karakter yang berbeda dari diplomasi pada umumnya. Diplomasi kemanusiaan ini ditujukan untuk menyelamatkan umat manusia tanpa memandang ras, suku, agama, gender, keyakinan politik maupun warga negara. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa diplomasi kemanusiaan adalah upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan manusia tanpa melihat pada latar belakang atau faktor-faktor tertentu (Ambarwati, 2010:126).

Konsep diplomasi kemanusiaan ini merupakan kerangka kerja yang sangat penting dalam menganalisis berbagai usaha yang berbeda yang dilakukan oleh berbagai aktor dengan tujuan jangka pendek yang berbeda pula diberbagai belahan bumi. Bagi para pekerja kemanusiaan, diplomasi kemanusiaan merupakan pekerjaan mereka sehari-hari ditengah situasi yang terkadang sangat beragaya untuk menyelamatkan kehidupan orang yang membutuhkan pertolongan. Tak dapat dipungkiri bahwa para pekerja kemanusiaan akan terlibat dengan negosiasi dengan aktor-aktor negara dan

bukan negara dimana mereka itu hanya memiliki kesamaan kepentingan, nilai, dan tujuan yang sangat kecil (Ambarwati, 2010:126).

Saat ini dengan semakin berkembangnya situasi dan pola hubungan internasional, maka diplomasi kemanusiaan tidak hanya dilakukan oleh aktor negara (*state actor*) semata namun juga melibatkan aktor non-negara (*non-state actor*). Mereka dapat berasal dari organisasi-organisasi non pemerintah maupun individu. Dapat kita lihat bahwa diplomasi kemanusiaan melibatkan banyak pihak baik dari mapun luar pemerintahan yang diperuntukkan untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih bermartabat.

Dalam Ilmu hubungan internasional, konsep antara kemanusiaan dan diplomasi adalah dua hal yang berbeda. Bahkan acap kali keduanya saling berbenturan. Hal ini didasari atas dasar kepentingan negara (*national interest*) dan kepentingan dunia internasional secara umum. Hal ini bisa dipahami mengingat tidak semua kepentingan negara selalu berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat internasional.

Sehingga, kehadiran diplomasi kemanusiaan (*humanitarian diplomacy*) sebenarnya lahir sebagai jawaban atau solusi atas paradoks tersebut. Terlebih lagi jika hal tersebut bersinggungan dengan isu kemanusiaan yang diakibatkan oleh adanya konflik. Karena keberadaan diplomasi kemanusiaan berusaha untuk menjembatani antara dua kepentingan tersebut. Hal ini sebagaimana yang diuraikan dalam beberapa literatur yang menyebutkan bahwa diplomasi kemanusiaan dipahami sebagai sebuah upaya damai yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan utamanya terhadap komitmen yang didasarkan kepada prinsip – prinsip, nilai dan norma kemanusiaan yang universal. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Sugiono, M., & Rosyidin, M. Dalam artikel yang berjudul *Mengosiasikan yang tidak bisa dinegosiasikan ; menjembatani kepentingan Nasional dan Kepentingan Internasional dalam konsep diplomasi kemanusiaan*.

Adapun tujuan diplomasi kemanusiaan adalah: *“humanitarian diplomacy aims to mobilise public and governmental support and resources for humanitarian operations and programmes, and to facilitate effective partnerships for responding to the needs of vulnerable people. Humanitarian diplomacy includes advocacy, negotiation, communication, formal agreements, and other measures. It is a field with many players, including governments, international organisations, NGOs, the private sector, and individuals”* (Pease, 2016 :56).

Diplomasi kemanusiaan umumnya tidak mengandalkan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan. Penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan (*coercive diplomacy*) dianggap tidak efisien untuk dijadikan sebagai instrumen diplomasi kemanusiaan. Instrumen tersebut dianggap kurang tajam untuk digunakan sebagai cara mencapai tujuan diplomasi kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan merupakan kegagalan

diplomasi kemanusiaan, karena tujuan diplomasi kemanusiaan hampir dapat dikatakan telah dicapai jika kekuatan militer tidak digunakan untuk membunuh, melukai dan merusak kehidupan manusia (Albayumi, Hadi, Susilo, 2018: 115).

Berdasarkan definisi diatas dapat dimaknai bahwasannya diplomasi kemanusiaan adalah jalan yang dapat ditempuh untuk menggalang dukungan dari pemerintah setiap negara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Semua bentuk upaya tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk tanggung jawab atas perlindungan bagi mereka yang terlantar melalui usaha advokasi, negosiasi, komunikasi atau perjanjian.

Dalam konteks ini, Indonesia juga memiliki posisi yang tegas sebagai sebuah bangsa yang bermartabat dan berkedaulatan. Bila dikaitkan dengan isu diplomasi, maka Indonesia mempunyai dua prioritas yaitu diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan. Kedua diplomasi ini memiliki keterkaitan erat dan saling mempengaruhi.

Dua diplomasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari amanat konstitusi Indonesia. Selain itu juga sebagai instrumen politik luar negeri Indonesia guna mewujudkan dukungan dan kepemimpinan Indonesia dimata global sebagai upaya pencegahan atau penanganan krisis kemanusiaan yang melanda dunia, sekaligus mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia.

Bila kita telaah maka dapat kita lihat konsistensi Indonesia dalam melakukan upaya diplomasi kemanusiaan. Salah satunya adalah Indonesia berperan aktif dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian krisis Palestina – Israel dan termasuk juga isu yang saat ini tengah hangat dibicarakan masyarakat internasional terkait upaya penyelamatan muslim Rohingnya diberbagai negara.

Indonesia patut berbangga dalam hal ini karena upaya diplomasi kemanusiaan yang telah dilakukan selama ini membuahkan hasil dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari dunia internasional. Hal ini terbukti dari dinobatkannya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.

Terpilihnya Indonesia dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara. Dari 190 suara anggota PBB, Indonesia memperoleh suara prioritas sebanyak 144 suara. Hasil ini tentu saja membanggakan Indonesia sekaligus menjadi motivasi besar untuk terus melakukan diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan secara konsisten sebagaimana amanat Konsititusi Indonesia.

Sehingga tak diragukan lagi bahwa Indonesia untuk masa mendatang akan tetap konsisten mengupayakan agar diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan tetap menjadi agenda prioritas dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Karena tanpa terciptanya perdamaian dunia maka dapat dipastikan tragedi-tragedi kemanusiaan akan mudah timbul.

Sebagaimana yang diuraikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia begitu konsisten dengan diplomasi kemanusiaan dan perdamaian yang diusung dan hal ini terlihat dari sikap-sikap

yang ditunjukkan sebagai bagian dari politik luar negeri Indonesia. Terkait dengan hal ini maka untuk mewujudkan dan menunjang eksistensinya, ada empat prioritas Politik Luar Negeri Indonesia diantaranya; Menjaga Kedaulatan NKRI, Perlindungan WNI di Luar Negeri, Diplomasi Ekonomi dan Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan dan Dunia Internasional.

Selain itu ada tiga hal yang menjadi sorotan utama dalam diplomasi dan politik luar negeri RI diantaranya; krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, bantuan pemerintah Indonesia untuk mendukung kemerdekaan palestina dan ketiga diplomasi perlindungan warga Indonesia yang berada di luar negeri. Dan saat ini salah satu agenda mendesak adalah krisis kemanusiaan di Rakhine sebagai bagian dari upaya diplomasi pemerintah Republik Indonesia.

Terkait dengan upaya diplomasi kemanusiaan Indonesia di Myanmar, pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri bertemu dengan Panglima Bersenjata Myanmar Jenderal *Tathmadaw U Ming Aung Hlaing* dan mendesak militer Myanmar agar menghentikan kekerasan di Rakhine. Sedangkan, ketika bertemu dengan *State Counsellor Daw Aung Saan Suu Kyi*, sebagai pemimpin *de facto* Myanmar. Menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan proposal formula 4+1 untuk penyelesaian krisis untuk Rakhine, yang mana 4 elemen utama tersebut yaitu:

1. Mengembalikan stabilitas dan keamanan;
2. Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan;
3. Perlindungan terhadap semua orang yang berada di Rakhine state tanpa memandang suku dan agama;
4. Pentingnya agar segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Berikut dapat kita lihat beberapa bantuan kemanusiaan yang sudah diberikan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya diplomasi kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya :

**Tabel 1: Upaya Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia bagi Rohingya**

<b>Bentuk Bantuan</b>	<b>Uraian</b>
Pembentukan kerja sama dengan Pemerintah Myanmar terkait upaya resolusi konflik di Rakhine	Kerja sama dengan Myanmar diwujudkan dalam bentuk proses rekonsiliasi, demokratisasi, dan pembangunan inklusif, termasuk upaya implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan.
Penunjukkan Menteri Luar Negeri Indonesi menjalin komunikasi interaktif dengan berbagai pihak	Pemerintah secara tegas menugaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) menjalin komunikasi intensif dengan berbagai aktor, termasuk Sekretaris Jenderal PBB

	dan Komisi Penasehat khusus untuk Rakhine State Koffi Annan
Pembentukan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM)	Merupakan aliansi yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia atas kasus kemanusiaan yang terjadi di Rakhine. Aliansi ini dibentuk dalam rangka untuk mencegah bencana. Salah satu programnya adalah pembentukan Program <i>Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO)</i> dengan komitmen bantuan USD 2 Juta.
Pembentukan program <i>Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO)</i>	Program ini merupakan agenda Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) Untuk Myanmar yang bertujuan membantu masyarakat Myanmar, khususnya di Rakhine State. Program ini diluncurkan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2017. Bantuan yang diberikan diantaranya berupa peningkatan kapasitas, pengiriman tenaga ahli,, <i>livelihood</i> , dan pemulihan.
Upaya mendorong agar terwujud menjadi anggota tidak tetap <i>United Nations Security Council (UNSC)</i>	Pemerintah Indonesia dengan segenap upaya mendorong agar dapat terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat melakukan tindakan yang optimal bagi penciptaan perdamaian dunia.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bentuk upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dibantu oleh Kementerian Luar Negeri berfokus pada upaya untuk mendorong berakhirnya kekerasan bernuansa etnis di Myanmar.

### **Pengaruh Bantuan Kemanusiaan dan Upaya Diplomasi Indonesia**

Tak dapat diabaikan bahwasannya konflik kekerasan yang terjadi di Myanmar merupakan kekerasan yang cukup menyedihkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan terutama pada era global saat ini. Dari Sumber Aksi Cepat Tanggap (ACT) diketahui bahwa Saat ini Muslim Rohingya yang masih berada

di Rakhine hidup terisolasi dalam ketakutan. Sejauh ini jumlah populasi etnis Rohingya di Provinsi Rakhine semakin menurun drastis hingga menjadi 40% dibanding tahun sebelumnya. Populasi Rohingya menurut UNHCR ialah 1,3 juta orang, dimana 926.000 adalah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan 375.000 lainnya menjadi pengungsi di negara mereka sendiri. Sejak tahun 2013 lalu, ribuan warga melarikan diri ke negara-negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand melalui jalur laut.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Konflik yang terjadi di Myanmar saat ini mendapatkan sorotan dunia internasional serta menggugah nilai-nilai kemanusiaan dan hati nurani untuk turut berkontribusi pada penyelesaiannya. Begitu juga dengan Indonesia selaku negara pendukung perdamaian turut memberikan kontribusi yang diharapkan dapat mendorong pada upaya mengakhiri konflik yang tengah terjadi.

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwasannya Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia merupakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang berfokus pada upaya menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu Indonesia begitu aktif bahkan dapat menjadi garda terdepan di tingkat ASEAN dalam konflik Rakhine.

K.J. Holsti mendefinisikan Politik Luar Negeri sebagai *“as the analysis of decisions of a state toward the external environment and the condition-usually domestic under which these actions are formulated”* (Holsti, 1970: 14). Hal ini berarti bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor internal sebelum sebuah politik atau kebijakan diambil. Kebijakan ini secara tidak langsung juga menjadi komitmen suatu negara dalam konteks hubungannya dilingkungan eksternal.

Dalam konteks kekerasan terhadap Rohingya ini, langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dilandasi oleh berbagai faktor. Bila kita lihat lebih jauh ada 2 faktor utama yang mendorong Indonesia melakukan upaya perdamaian bagi Rohingya yang menjadi arah dari Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia yaitu Faktor faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang menjadi landasan utama Diplomasi Indonesia ditingkat internasional dalam kasus kekerasan Rohingya ini adalah sebagaimana yang tercantum didalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu *“.....ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”*. Berangkat dari amanah inilah Indonesia menempatkan upaya perdamaian dunia sebagai salah satu agenda penting dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia sekaligus sebagai wujud jatidiri bangsa.

Faktor lain yang juga merupakan alasan internal yaitu beranjak dari perasaan senasib dan sepenanggungan yang juga pernah dirasakan oleh Indonesia saat masih berada pada era penjajahan kolonial selama ratusan tahun. Sehingga bangsa Indonesia sangat memahami arti dari kemerdekaan dan bebas

dari segala bentuk penindasan. Hal ini sesuai sebagaimana amanah yang tercantum dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, *“bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”*.

Faktor lainnya yang turut menyumbang bagi landasan kebijakan Indonesia bagi kelompok Rohingnya yaitu adanya faktor sesama muslim yang menjadi keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia. Meskipun terdengar sangat klise, namun tak pelak dorongan dari kelompok muslim Indonesia menuntut agar Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dan menempatkan diri sebagai pihak yang mendukung penghentian kekerasan bagi minoritas Rohingnya di Myanmar.

Sedangkan bila melihat pada faktor eksternal salah satu pertimbangannya adalah pentingnya membangun kepercayaan internasional sekaligus menegaskan kembali keberpihakan Indonesia pada kasus muslim Rohingnya ini. Karena tak dapat dipungkiri bahwa dukungan negara lain bagi suatu negara akan menentukan pola interaksi yang akan berlangsung bagi masa mendatang. Secara tidak langsung, bahwa adanya tekanan internasional juga akan mempengaruhi arah kebijakan politik suatu negara.

Bila kita menilik lagi pada konteks ini secara lebih mendalam, maka dapatt kita katakan bahwa bantuan kemanusiaan yang dilakukan masyarakat aceh bagii pengungsi Rohingnya turut mempengaruhi upaya diplomasi kemanusiaan pemerintah Indonesia. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwasannya pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya baik ditingkat regional maupun global dalam rangka mengakhiri konflik Rakhine ini.

Berita baik bagi Indonesia tepatnya pada 1 Januari 2019, Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa dua tahun mendatang sampai dengan 31 Desember 2020. Empat negara lain yang juga bergabung dengan Indonesia yaitu Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan Jerman. Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB bukanlah hal baru baru Indonesia. Sebelumnya Indonesia pernah menduduki posisi ini pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Pada pemilihan Juni 2018 lalu, Indonesia mendapat dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB. Terpilihnya Indonesia maka akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB. merujuk pada situs PBB, [www.un.org](http://www.un.org) Indonesia juga akan menjabat posisi Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019.

Menjadi menarik untuk dipahami bersama bahwasannya terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan Keamanan PBB merupakan bukti dari besarnya dukungan internasional yang merupakan bentuk kepercayaan

masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang signifikan dalam menjaga perdamaian dunia. Sehingga, momentum ini menjadi sangat krusial bagi Indonesia karena sekaligus memberikan ‘kemudi’ bagi Indonesia untuk menjalankan diplomasi kemanusiaan dan kebijakan politik luar negeri lainnya dibidang perdamaian.

Oleh karena itu dapat dijelaskan lebih lanjut bahwasannya bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya telah sejalan dengan upaya diplomasi kemanusiaan Indonesia. Bahkan, tindakan ini bagian dari upaya untuk menunjang kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan ditingkat kawasan dan juga global.

Perlu ditegaskan kembali bahwa diplomasi kemanusiaan merupakan salah satu agenda yang diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia, sebagaimana telah diatur di dalam konstitusi nasional. Bahwa dalam mengatasi isu kemanusiaan yang bersifat multi-dimensional, diplomasi track 1.5 diperlukan keikutsertaan -semua elemen bangsa demi memperoleh skema kerjasama dan solusi yang tepat. Sehingga dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa bantuan kemanusiaan masyarakat Aceh ikut menunjang agenda penting pemerintah Indonesia.

Dapat kita pahami bahwa agenda penting pemerintah dibidang diplomasi kemanusiaan ini tetap akan berjalan andaikata sekalipun masyarakat Aceh tidak memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya tersebut. Namun, di titik inilah kebijakan dan upaya diplomasi pemerintah Indonesia menjadi begitu signifikan dan krusial mengingat peran penting segala elemen bangsa dibutuhkan. Dengan kata lain dapat kita katakan bahwa kontribusi dari masyarakat Aceh dalam konteks ini memperkuat dan mendukung upaya Diplomasi kemanusiaan pemerintah Indonesia.

Berdasarkan sumber Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwa dalam kegiatan Regional Conference on Humanitarian Assistance di Jakarta pada 8 Agustus 2019 yang diikuti oleh 17 negara di lawasan, 5 organisasi internasional dan 17 lembaga swadaya masyarakat di bidang kemanusiaan, Indonesia memprakarsai untuk mendorong penguatan kemajuan kepemimpinan diplomasi kemanusiaan Indonesia di tingkat kawasan dan global. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang menjadikan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan sebagai salah satu prioritasnya.

Terdapat lima isu utama yang telah dibahas oleh para peserta konferensi tersebut, yakni mengenai (i) Pemberdayaan aktor kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal; (ii) Kerja sama dan kolaborasi *multi-sectoral* dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan; (iii) Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang tua; (iv) Aspek keberlanjutan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan, yang mendukung transisi dari fase tanggap darurat ke fase

pembangunan; serta (v) Perlindungan aktor kemanusiaan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.

Bila meninjau pada lima isu strategis pada kegiatan tersebut dapat kita katakan bahwa masyarakat Aceh dan kontribusinya bagi pengungsi Rohingnya ini sebagai aktor kemanusiaan ditingkat lokal dan nasional. Sehingga secara tidak langsung telah mendukung keberlanjutan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan pada poin berikutnya. Selain itu juga dapat dimaknai bahwa aktor kemanusiaan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan ini berhak atas perlindungan.

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwasannya aktor kemanusiaan dewasa ini tidak hanya dapat dilakukan oleh negara atau organisasi internasional saja, namun dalam beberapa kasus peran masyarakat internasional atau perseorangan menjadi signifikan. Sama halnya dengan bantuan masyarakat Aceh bagi pengungsi Rohingnya yang berpengaruh bagi penyelenggaraan dan keberlangsungan diplomasi kemanusiaan Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat Aceh kepada pengungsi Rohingnya turut mempengaruhi upaya diplomasi kemanusiaan pemerintah Indonesia. Peran masyarakat Aceh yang dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai aktor kemanusiaan turut memperkuat sekaligus menegaskan posisi kepemimpinan Indonesia ditingkat kawasan dan global sebagai pendukung perdamaian dunia. Sehingga secara tidak langsung masyarakat Aceh juga menempatkan dirinya sebagai *peace supporter* yang siap menyokong kebijakan politik luar negeri Indonesia dan yang mengedepankan diplomasi kemanusiaan sebagai langkah strategis menciptakan perdamaian dunia.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan politik luar negeri suatu negara dapat dikatakan juga merupakan cerminan dari prinsip-prinsip dasar sebuah negara yang memuat langkah-langkah strategis di tingkat global. Dalam konteks ini Indonesia mengedepankan politik luar negeri yang berfokus pada diplomasi kemanusiaan sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian dunia sebagaimana juga yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia, Indonesia gencar melakukan diplomasi kemanusiaan terutama pada kasus kekerasan terhadap muslim Rohingnya di Rakhine Myanmar. Indonesia juga memprakarsai untuk mendorong penguatan kemajuan kepemimpinan diplomasi kemanusiaan Indonesia di tingkat kawasan dan global. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan Pemberdayaan aktor kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal. Selain itu juga membangun Kerja sama dan kolaborasi *multi-sectoral* dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat Aceh

kepada pengungsi Rohingya memberikan pengaruh bagi perjalanan dan rekam jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan ditingkat global. Kontribusi masyarakat Aceh dalam hal ini memberikan penguatan dan mempertegas posisi Indonesia sebagai *leader* bagi upaya perdamaian dunia melalui Diplomasi kemanusiaan. Dan masyarakat aceh dapat ditempatkan sebagai aktor kemanusiaan yang menyokong penuh upaya pemerintah Indonesia bagi langkah-langkah strategis dalam diplomasi kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Denny R dan Rina Rusman (eds). (2010). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali
- Azwar, Saifuddin. (1998). *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Fuat Albayumi, Nourma Meysita Hadi, Djoko Susilo. (2018). “Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017”, *Nation State: Journal of International Studies*, Vol. 1 (2).
- ICRC. (2005). *Kenali ICRC*”. Jenewa
- K J. Holsti. 1970. “*National Role Conceptions in the study of Foreign policy*”.Vol. 14, No. 3
- Kelly-Kate Pease,”Human Rights and Humanitarian Diplomacy : Negotiating for Human Rights Protection and Humanitarian Access”, (Manchester : Manchester University Press)
- Leedy, Paul D. (1997). *Practical Research, Planning and Design*, New Jersey : Prentice Hall,inc.
- Ludfiani, Anifa , Abubakar Eby Hara, dan Bagus Sigit Sunarko, “Krisis Kemanusiaan dan Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya. (2017)” *Jurnal E-SOSPOL* Volume IV Edisi 2, Mei – Agustus
- Marelda, Santa. (2011). “Responsibility to Protect: Suatu Tanggung Jawab dalam Kedaulatan Negara”. *Jurnal Hubungan Internasional* .Vol 2. No.1
- Minar, Larry dan Hazel Smith.(2007). *Humanitarian Diplomacy : Practitioner and their Craft*, Tokyo:United Nations University.
- Nazir, Muhammad. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghafia Indonesia
- Pease, Kelly-Kate . (2016). *Human Rights and Humanitarian Diplomacy : Negotiating for Human Rights Protection and Humanitarian Access*. Manchester : Manchester University Press
- Report of ICSS (International Commission on Intervention and State Sovereignty). (2001). *Responsibility to Protect*. Canada :International Development Research Centre.
- Sugiono, (1999). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung :CV Alfabeta.
- Sugiono, M., & Rosyidin, M. (n.d.). *Mengosiasikan yang tidak bisa dinegosiasikan ; menjembatani kepentingan Nasional dan Kepentingan*

*Internasional dalam konsep diplomasi kemanusiaan*, diakses tanggal 31 Juli 2019 dari situs [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net).

- Ula, Syarifatul.(2017). “Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar” *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 3
- Yumitro, Gonda . (2017). “Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya”. *Jurnal Sospol* Vol 3 No 2 Juli-Desember